



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-10.AH.11.02 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MASA BAKTI 2024-2029**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima surat permohonan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01/DPP/02/VIII/2024, tanggal 25 Agustus 2024, hal Permohonan Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029 Berdasarkan Hasil Muktamar PKB 2024 di Bali, Tanggal 24-25 Agustus 2024;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MASA BAKTI 2024-2029.
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029, dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat 10430, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 25 Agustus 2024 tentang Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yang dibuat dihadapan Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA : Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,




SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-10.AH.11.02 TAHUN 2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

**PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MASA BAKTI 2024-2029**

DEWAN SYURA

Ketua	: K. H. Ma'ruf Amin;
Wakil Ketua	: K. H. Subhan Makmun;
Wakil Ketua	: K. H. Manarul Hidayah;
Wakil Ketua	: K. H. Alwi Shihab;
Wakil Ketua	: K. H. Zainal Arifin Junaidi;
Wakil Ketua	: K. H. Zamzami Mahrus;
Wakil Ketua	: K. H. R. Chaedar Afandi;
Wakil Ketua	: H. Andi Muawiyah Ramli;
Sekretaris	: H. Saifullah Ma'shum;
Wakil Sekretaris	: K. H. Maman Imanulhaq;
Wakil Sekretaris	: H. R. Taufik Abdullah;
Anggota	: K. H. Syihabuddin Ahmad;
Anggota	: K. H. Badawi Basyir;
Anggota	: Nyai Nurhayati Said Aqil;
Anggota	: K. H. Fahim Royani;
Anggota	: K. H. Nashirul Mahasin;
Anggota	: K. H. Acep Adang Ruhiyat;
Anggota	: Nyai Latifah Shohib;
Anggota	: Nyai Mufidah Munir;
Anggota	: H. Arvin Hakim Toha;
Anggota	: Habib Syarif Muhammad;
Anggota	: H. Dedi Wahidi;
Anggota	: K. H. Otong Abdurrahman;
Anggota	: Nursjahbani Katjasungkana;
Anggota	: H. Saiful Bahri Anshori;
Anggota	: K. H. Anis Maftuhin Jazuli;

DEWAN TANFIDZ

Ketua Umum	: H. A. Muhaimin Iskandar;
Wakil Ketua Umum	: Faisol Riza;
Wakil Ketua Umum	: Jazilul Fawaid;
Wakil Ketua Umum	: M. Hanif Dhakiri;
Wakil Ketua Umum	: Hj. Ida Fauziyah;
Wakil Ketua Umum	: Cucun A. Syamsurijal;
Wakil Ketua Umum	: M. Rano Alfath;

Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, Legislatif dan Pengurus	: A. Halim Iskandar;
Sekretaris	: P. Dhedhy Styawan;
Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian	: Anggia Ermarini;
Sekretaris	: Caswiyono Rusdi;
Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pertanahan	: Marwan Jafar;
Sekretaris	: Febri Diana;
Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	: Marwan Dasopang;
Sekretaris	: Luqman Hakim Al Jambi;
Ketua Bidang Hukum, Perundang-Undangan dan Hankam	: Ahmad Fauzi;
Sekretaris	: N. M. Dipo Nusantara P.;
Ketua Bidang Energi dan SDA	: Daniel Johan;
Sekretaris	: Ratna Juwita;
Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif	: Chusnunia Chalim;
Sekretaris	: Tommy Kurniawan;
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata	: Azhar Arsjad;
Sekretaris	: Hj. Zainun Nasichah;
Ketua Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat	: Muamir Muin Syam;
Sekretaris	: Irmawan;
Ketua Bidang Komunikasi & Informasi Teknologi	: Ahmad Iman Syukri;
Sekretaris	: Ella Siti Nuryamah;
Ketua Bidang Kesehatan dan Inklusi Disabilitas	: Nihayatul Wafiroh;
Sekretaris	: M. Makky Zamzami;
Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri	: Luluk Nur Hamidah;
Sekretaris	: Farida Farichah;
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional	: Zaini Rahman;
Sekretaris	: Risharyudi Triwibowo;
Ketua Bidang Pengembangan SDM	: Yanuar Prihatin;
Sekretaris	: Nur Nadlifah;
Ketua Bidang Pendidikan & Pesantren	: Syaiful Huda;
Sekretaris	: Abdul Wahid;
Ketua Bidang Perindustrian & Perdagangan	: Lukmanul Khakim;

Sekretaris : Nasim Khan;
Ketua Bidang Olahraga, Kesenian & Milenial : Siti Haniatunnisa;
Sekretaris : Heru Widodo;
Ketua Bidang Keuangan & Perbankan : Eko Putro Sandjojo;
Sekretaris : Muhammad Kadafi;
Ketua Bidang Agama & Dakwah : M. Yusuf Chudlori;
Sekretaris : Hindun Anisah;
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak : Siti Masrifah;
Sekretaris : Arzeti Bilbina;
Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Migran Indonesia : Dita Indah Sari;
Sekretaris : Siti Mukaromah
Sekretaris Jenderal : **M. Hasanuddin Wahid**;
Wakil Sekretaris Jenderal : Zainul Munasichin;
Wakil Sekretaris Jenderal : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz;
Wakil Sekretaris Jenderal : Muhlisin Erce;
Wakil Sekretaris Jenderal : Firly Umar Wahid;
Bendahara Umum : **Bambang Susanto**;
Wakil Bendahara : Bertu Merlas;
Wakil Bendahara : Anna Mu'awanah;
Wakil Bendahara : Mulyadi Siregar, S.E., M.B.A.;
Wakil Bendahara : Peggy Patricia Pattipi;
Wakil Bendahara : Miftahul Jannah.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRATMAN ANDI AGTAS